

## **ANALISIS DETERMINAN ATAS BELANJA MODAL DI DESA-DESA KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH NTB**

**Meliani Prihatin<sup>1</sup>**

[Melianiprihatin99@gmail.com](mailto:Melianiprihatin99@gmail.com)

<sup>1</sup>*Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram*

**Biana Adha Inapty<sup>2</sup>**

[bianainapty@hotmail.com](mailto:bianainapty@hotmail.com)

<sup>2</sup>*Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram*

**Adithiya Bayu Suryantara<sup>3</sup>**

[adhityabayus@unram.ac.id](mailto:adhityabayus@unram.ac.id)

<sup>3</sup>*Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram*

### **ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk menguji serta membuktikan bahwa variabel Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR), Luas Wilayah, Jumlah Perangkat Desa, dan Jumlah Penduduk memberikan pengaruh terhadap Belanja Modal. Pendekatan penelitian ini yaitu kuantitatif dengan memakai data sekunder dari situs asli Badan Pusat Statistik Lombok Tengah dan Laporan Realisasi APBDes. Populasi dalam penelitian ini yakni semua desa selama tiga tahun, sehingga sampel yang diperoleh sebanyak 36 dengan proses *purposive sampling* atau sampel jenuh. Teknik dalam menganalisis data memakai regresi linier berganda. Temuan yang didapatkan dari hasil uji penelitian ini yaitu hanya DD dan BHPR yang mempengaruhi belanja modal secara persial, tetapi secara bersamaan semua variabel dapat mempengaruhi belanja modal. Hasil dari uji penelitian ini bisa dijadikan sebagai *platform* dalam rangka pengalokasian belanja modal di desa, sehingga terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik kedepannya.

**Kata Kunci:** Alokasi Dana Desa, Belanja Modal, Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa.

### **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to test and prove that the variables Village Original Income (PADes), Village Funds (DD), Village Fund Allocation (ADD), Tax and Retribution Sharing Funds (BHPR), Area Area, Number of Village Apparatus, and Total Population has an influence on Capital Expenditures. This research approach is quantitative using secondary data from the original website of the Central Lombok Central Statistics Agency and the APBDes Realization Report. The population in this study was all villages for three years, so that the samples obtained were 36 using a purposive sampling process or saturated samples. The technique for analyzing data uses multiple linear regression. The findings obtained from the test results of this research are that only DD and BHPR influence capital expenditure partially, but simultaneously all variables can influence capital expenditure. The results of this research test can be used as a platform for allocating capital expenditure in villages, so that better public services can be realized in the future.*

**Keywords:** Village Fund Allocation, Capital Expenditure, Village Fund, and Village Original Income.

## PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat yang diakui secara hukum dan mempunyai batas-batas yang jelas, mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan dan mengurus urusan negara, serta kemampuan untuk mewakili kepentingan masyarakat setempat melalui prakarsa berbasis masyarakat dan hak-hak adat/tradisional yang dimilikinya, ditegakkan oleh sistem pemerintahan negara persatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kedudukan yang sangat penting didalam organisasi pemerintah Indonesia mengingat bahwa Desa merupakan satuan pemerintah paling kecil yang mempunyai peran utama untuk bangsa (Pinilih, 2018). Setiap desa mendapat pendanaan dari APBN untuk mendorong pembangunan desa, hal tersebut merupakan langkah besar untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Desa (Rogers and Taufiqurrahman; 2021). Desa memperoleh banyak dana baik dari pendapatan asli desa serta transfer dan sumber lainnya. Pendapatan transfer Desa terdiri atas DD, ADD, dan BHPR (Muslikah dkk, 2020). Desa diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mengelola rumah tangganya sedemikian rupa sehingga memaksimalkan kemampuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kewenangan ini tunduk pada peraturan hukum (Indika dkk, 2022). Setiap desa berhak melakukan pengelolaan keuangan, termasuk pengendalian belanja modal (Saputri dkk, 2023). Pengeluaran pemerintah untuk belanja modal atas aktiva tetap tertentu Halima (2016). Belanja modal diduga berdampak terhadap perekonomian lokal Halima (2016). Berdasarkan para peneliti sebelumnya belanja modal diperkirakan dapat mempengaruhi PADes, DD, ADD, BHPR, Luas Wilayah, Jumlah Perangkat Desa, dan Jumlah Penduduk.

Pengaruh PADes atas belanja modal sudah dilakukan oleh Purbasari dkk; (2018), Ramadhan (2019), Dasuki (2020), Wulandari dkk; (2021), dan Murtadlo dkk; (2022) hasilnya menunjukkan bahwa ada yang berpengaruh positif dan ada yang tidak berpengaruh. Yang berpengaruh positif seperti penelitian Purbasari dkk; (2018), Ramadhan (2019), Dasuki (2020), dan Murtadlo dkk; (2022). Sedangkan yang tidak berpengaruh seperti penelitian Wulandari dkk; (2021). Selain PADes ada juga DD yang mempengaruhi Belanja Modal. Penelitian DD terhadap belanja modal dilakukan oleh Murtadlo dkk; (2022), Wulandari dkk; (2021), Indika dkk; (2022), dan Purbasari dkk; (2018). Penelitian Murtadlo dkk; (2022), Wulandari dkk; (2021), dan Indika dkk; (2022) menunjukkan hasil yang positif, sedangkan penelitian Purbasari dkk; (2018) menunjukkan hasil tidak berpengaruh. Kemudian belanja modal juga dipengaruhi oleh ADD. Penelitian ADD terhadap belanja modal dilakukan oleh Yulawati (2019), Amnan & Hardiani (2019), dan Saputri dkk; (2023). Penelitian Yulawati (2019), Amnan & Hardiani (2019) menunjukkan hasil yang positif, sedang penelitian Saputri dkk; (2023) menunjukkan hasil tidak signifikan. Selanjutnya yang mempengaruhi belanja modal yaitu BHPR. Penelitian BHPR terhadap belanja modal dilakukan oleh Pratama & Wiratmaja (2021), Saputri dkk; (2023), Dihastuti (2021), dan Purbasari dkk; (2018). Penelitian Pratama & Wiratmaja (2021), Saputri dkk; (2023), dan Dihastuti (2021) menunjukkan hasil yang positif, sedang penelitian Purbasari dkk; (2018) menunjukkan hasil tidak berpengaruh. Selanjutnya yang mempengaruhi belanja modal yaitu Luas Wilayah. Penelitian Luas Wilayah terhadap belanja modal dilakukan oleh Rohmah & Riharjo (2019), Zulaihah (2019), dan Wulandari dkk; (2021). Penelitian Rohmah & Riharjo (2019) dan Zulaihah (2019) menunjukkan hasil yang positif signifikan, sedangkan penelitian Wulandari dkk; (2021) menunjukkan hasil tidak signifikan. Selanjutnya yang mempengaruhi belanja modal yaitu jumlah perangkat desa. Penelitian jumlah perangkat desa terhadap belanja modal dilakukan oleh Wahyudi & Hasri (2021), dan Wulandari dkk; (2021). Penelitian Wahyudi & Hasri (2021) menunjukkan hasil positif signifikan, sedangkan penelitian Wulandari dkk; (2021) menunjukkan hasil tidak signifikan. Kemudian yang terakhir yang mempengaruhi belanja modal yaitu jumlah penduduk. Penelitian jumlah penduduk terhadap belanja modal dilakukan oleh Kiha dkk; (2021), dan Marseno & Mulyani (2020). Penelitian

Kiha dkk; (2021) menunjukkan hasil positif signifikan sedangkan, penelitian Marseno & Mulyani (2020) menunjukkan hasil tidak signifikan.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil penelitian yang beragam, tidak hanya itu penelitian terkait belanja modal khususnya di Desa juga masih minim dilakukan. Selain itu belum ditemukannya penelitian yang sejenis yang mengkaji mengenai belanja modal di setiap desa yang ada di Kecamatan Janapria. Untuk itu peneliti melaksanakan penelitian di desa-desa di Kecamatan Janapria yaitu untuk mengetahui seberapa besar belanja modal yang ada di setiap desa tersebut dan apa saja yang menjadi faktor penentu terhadap belanja modalnya. Berdasarkan hasil empiris dari para peneliti terdahulu, ada beberapa penyebab yang mempengaruhi belanja modal yaitu antara lain PADes, Dana Desa, ADD, BHPR, hal ini sesuai sama penelitian yang Purbasari dkk (2018). Penelitian ini menegaskan temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan Wulandari dkk (2021). Variabel yang digunakan dalam penelitian Wulandari dkk (2021) yaitu PADes, Dana Desa, ADD, BHPR, Luas Wilayah dan Jumlah Perangkat Desa, namun peneliti ini menambahkan satu variabel yaitu Jumlah Penduduk, tidak hanya itu peneliti saat ini juga memakai lebih dari satu tahun Laporan Realisasi APBDes yaitu tiga tahun (2019-2021). Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan memberi informasi sebagai bahan evaluasi terhadap otoritas terkait ketika mengambil keputusan terhadap belanja modal.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Teori *Stewardship***

Teori *stewardship* yaitu suatu kondisi bilamana manajer mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dengan keperluan individu agar tercapai keberhasilan organisasi dan kebahagiaan rakyat (Ayem and Nugroho, 2020). Dalam teori ini, administrasi di dalam suatu organisasi berfokus pada harmonisasi antara *principal* dan *steward* dalam meraih tujuan bersama (Anton, 2010). Berdasarkan penelitian ini, maka teori *stewardship* menjelaskan keberlangsungan kondisi pemerintah sebagai institusi yang bisa diandalkan oleh masyarakat agar memenuhi kebutuhannya, menampung aspirasinya, dan mengawasi pengelolaan dana yang dipercayakan kepadanya agar lebih maju, baik dari tujuan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi secara maksimal (Jefri 2018). Didalam hal ini, pemerintah desa adalah (*steward*) dan rakyat adalah (*principal*), artinya bahwa pemerintah desa berperan menjadi pemberi pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mengelola sumber daya miliknya, sedangkan masyarakat sebagai penerima sumber daya dan pelayanan-pelayanan terbaik dari pemerintah. Keterkaitan ini bisa dilihat dari komitmen antar pemerintah desa dan rakyat atas dasar kejujuran dan kebersamaan berdasarkan target organisasi. Adapun target organisasi sektor publik yaitu memberi pelayanan terhadap masyarakat luas dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan teori ini *principal* menginginkan tanggung jawab bersama sesuai dengan kontribusi *steward* Raharjo (2016).

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

APBDes seperti tercantum pada peraturan pemerintahan desa merupakan perencanaan keuangan pemerintah desa dan biaya musyawarah desa. Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyebutkan rencana terhadap keuangan pemerintah desa selama satu tahun atau biasa dikenal dengan APBDes (Wulandari dkk; 2021).

### **Pendapatan Asli Desa**

PADes sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 diartikan sebagai penerimaan yang diperoleh atas wewenang desa menurut hak/asal usul dan wewenangan dalam skala desa setempat. Penerimaan atas usaha, harta atau aset, gotong royong,

partisipasi, dan penerimaan asli desa lainnya yang diperoleh yakni penerimaan asli desa itu sendiri.

### **Dana desa**

Seperti yang dimaksud PP No. 8 Tahun 2016 yakni dana yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dari APBN yang khusus diberikan kepada desa. Dana tersebut dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

### **Alokasi Dana Desa**

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa ADD yaitu sisa dana yang diperoleh kabupaten/kota dalam APBD sesudah dipotong DAK.

### **Bagi Hasil Pajak dan Retribusi**

Dana Bagi Hasil ditetapkan dengan Perbup No. 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Perimbangan. Dana ini disalurkan ke desa-desa sebagai sebagian dari dana yang dipungut dari pajak dan retribusi daerah.

### **Belanja Modal**

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lain yang menghasilkan keuntungan dalam banyak periode akuntansi (Halim 2014). Belanja modal dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan jenis aset tetap seperti belanja modal untuk mesin dan peralatan, belanja modal untuk bangunan dan struktur, belanja modal untuk jalan, irigasi, dan jaringan, dan belanja modal untuk biaya tetap lainnya.

### **Rumusan Hipotesis**

#### **Pengaruh PADes terhadap Belanja Modal**

PADes sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 bisa diartikan dengan penerimaan yang diterima dari wewenang desa menurut hak/ asal usul dan wewenang dalam skala desa setempat. Penerimaan atas usaha, harta atau aset, gotong royong, partisipasi, dan pendapatan asli desa lainnya yang diperoleh merupakan pendapatan asli desa itu sendiri. PADes mempengaruhi belanja modal karena semakin banyak pendapatan di setiap desa (PADes), maka akan banyak pula tingkat belanja modal desa tersebut. Dikarenakan dengan memperoleh pendapatan yang maksimal alokasi untuk belanja modal juga akan besar (Adiwiyana 2011). Karena pada dasarnya belanja modal ini dipergunakan untuk kepentingan masyarakat, hal ini sejalan dengan teori *stewardship* yang mementingkan kepentingan organisasi atau masyarakat dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Penelitian ini sesuai sama penelitian Purbasari dkk; (2018), Ramadhan (2019) serta Dasuki (2020) yang menyebutkan PADes mempengaruhi Belanja Desa.

H<sub>1</sub> : PADes mempengaruhi Belanja Modal

#### **Pengaruh Dana Desa terhadap Belanja Modal**

Dana Desa seperti dimaksud dalam PP No. 8 Tahun 2016 adalah dana yang disalurkan melalui APBD Kota/Kabupaten dari APBN yang khusus diberikan untuk desa. Dana desa berpengaruh terhadap belanja modal dikarenakan jika dana yang didapatkan besar, maka semakin mudah desa tersebut untuk mengelola apa yang diinginkan termasuk pengeluaran untuk belanja modal. Hal ini juga sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa yaitu untuk menyediakan dana bagi pembangunan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan

pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan yang ditetapkan melalui PMK Nomor 222/PMK.07/2020. Hal ini juga sesuai dengan teori *stewardship* bahwa Setiap desa pasti akan melakukan pembangunan sesuai dengan kepentingan organisasi dan masyarakat publik. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Murtdlo dkk., (2022), Wulandari dkk., (2021), dan Indika dkk., (2022) yang menyatakan Dana Desa mempengaruhi belanja Modal.

H<sub>2</sub> : DD mempengaruhi Belanja Modal

### **Pengaruh ADD terhadap Belanja Modal**

Pemerintah desa mengalokasikan ADD dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diperoleh desa dalam bentuk rupiah, setelah dikurangi DAK dari dana perimbangan Kabupaten/Kota. Pemerintah Kota/Kabupaten mengalokasikan ADD minimal 10% dari APBD Kabupaten/Kota setiap tahunnya. ADD mempengaruhi belanja modal karena semakin banyak perolehan dana dari ADD, maka pemerintah desa akan semakin mudah untuk membiayai pembangunan-pembangunan yang ada di desa. Hal ini sesuai sama misi teori *stewardship* dimana semua kebutuhan masyarakat harus di utamakan dari pada kebutuhan pribadi. Hasil penelitian ini sesuai sama penelitian Yuliawati (2019) dan Amnan (2019) yang menyatakan ADD dapat mempengaruhi belanja modal Desa.

H<sub>3</sub> : ADD mempengaruhi Belanja Modal

### **Pengaruh BHPR terhadap Belanja Modal**

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengamanatkan agar pemerintah Kabupaten/Kota memberikan kepada desa minimal 10% dari keseluruhan pendapatan pajak dan retribusi daerah dalam bentuk pajak dan retribusi daerah. BHPR mempengaruhi belanja modal karena pendapatan terutama pendapatan pajak setidaknya akan menambah porsi dari belanja modal desa. Dalam ruang lingkup daerah, apabila pajak naik maka belanja daerah juga naik dan begitu juga dengan defisit akan mengalami kenaikan (Adiwiyana 2011). Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* dimana teori ini memiliki tujuan yaitu semua kebutuhan masyarakat harus diutamakan dari pada kebutuhan masing masing individu. Penelitian ini sealur dengan penelitian Pratama (2021) yang menyebutkan bahwa BHPR mempengaruhi belanja bidang pelaksanaan pembangunan.

H<sub>4</sub> : BHPR mempengaruhi Belanja Modal.

### **Pengaruh Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal**

Kesatuan geografis suatu wilayah serta semua komponen yang berkaitan dengan batas wilayahnya dan sistem terkait yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan administratif dan fungsional disebut wilayah (Marseno dan Mulyani 2020). Dalam ruang lingkup daerah, wilayah yang cukup luas akan menghasilkan belanja pembangunan yang besar. Oleh karena itu, apabila wilayah ingin maju dan berkembang, maka pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk mendanai pembangunan di daerah. Pemerintah daerah harus bisa memanfaatkan dan menyalurkan belanja modal serta mengoptimalkan pembangunan guna mencapai kemajuan pembangunan daerah, begitu pula dengan desa (Marseno dan Mulyani 2020). Luas Wilayah mempengaruhi belanja modal karena, dengan adanya pembangunan di suatu desa maka masyarakat bisa memanfaatkan pembangunan tersebut dengan baik untuk mendukung aktivitas atau kelangsungan hidup masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* bahwa keperluan rakyat paling penting dibandingkan keperluan pribadi pemerintah desa. Penelitian ini sealur sama penelitian Rohmah dkk; (2019) yang menyebutkan bahwa daerah yang lebih besar sering kali perlu mengeluarkan lebih banyak dana untuk belanja modal karena memerlukan lebih banyak infrastruktur dan fasilitas untuk menyediakan layanan dan fasilitas publik yang berkualitas tinggi.

H<sub>5</sub> : LW mempengaruhi Belanja Modal.

### **Pengaruh Jumlah Perangkat Desa Terhadap Belanja Modal**

Perangkat desa dapat mempengaruhi belanja modal karena, banyaknya perangkat desa di suatu desa akan menambah alokasi anggaran belanja modal untuk perangkat desa seperti sarana dan prasarana (Wulandari dkk. 2021). Hal ini sejalan dengan teori *stewardship*, dimana kepentingan bersama lebih di utamakan dari pada kepentingan pribadi. Penelitian ini sesuai sama penelitian Saputra & Ningsih; (2022) yang menunjukkan bahwa Peran Perangkat Desa mempengaruhi Pengelolaan APBDDes, tetapi menurut Wahyudi & Hasri; (2021) menunjukkan bahwa kualitas perangkat desa mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa secara positif.

H<sub>6</sub> : JPD mempengaruhi Belanja Modal.

### **Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal**

Jumlah penduduk dapat mempengaruhi belanja modal karena semakin besar jumlah penduduk suatu desa, maka semakin besar total belanja modal yang harus dikeluarkan pemerintah desa, karena perencanaan penyaluran belanja daerah untuk memajukan desa didasarkan pada pertumbuhan penduduk. Hal ini sesuai dengan teori *stewardship* yakni pemerintah sebagai institusi yang bisa dipercaya mampu menampung aspirasi rakyat, dapat memberi pelayanan yang baik bagi masyarakat luas. Hal ini sesuai sama penelitian Kiha dkk., (2021) yang menyebutkan jumlah penduduk mempengaruhi belanja modal Daerah secara positif.

H<sub>7</sub> : JP dapat mempengaruhi Belanja Modal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif Adani et al. (2023); Febriani et al. (2023); Handajani (2019); Handajani et al. (2019); Ilmiah & Pendidikan (2023); Iskandar et al. (2022); Makhfudloh et al. (2018); Nur Fitriyah et al. (2021); Nurabiah (2018); Nurabiah Pusparini et al. (2019); Pudza (2023); Pusparini et al. (2022); Sari et al. (2016). Populasi yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu semua desa di Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok NTB yaitu 12 Desa selama 3 tahun (2019-2021), sehingga menghasilkan sampel sebanyak 36 dengan menggunakan sampel jenuh. Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data untuk penelitian ini. Peneliti melakukan observasi langsung kelokasi. Teknik analisis data yang dipakai yaitu linier berganda dengan bantuan SPSS 23. Pada penelitian ini peneliti menglogaritma naturalkan (Ln) supaya data tidak bias atau terjadi kesenjangan yang begitu tinggi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif, data penelitian dapat dikumpulkan dengan tiga cara berbeda yaitu pada tingkat pengumpulan data, pada tingkat penelitian yang diperoleh dari hasil pengumpulan data, dan pada tingkat pengolahan data untuk memberikan ringkasan permasalahan terkini (Tri Andjawati dkk. 2021). Nilai mean dan standar deviasi adalah dua contoh data deskriptif yang akan ditampilkan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1. Uji Statistik Deskriptif**  
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
PADes	36	0,000	17,977	154,06	4,2795	7,01828
DD	36	20,80	21,52	763,08	21,1966	,18943
ADD	36	20,32	21,03	743,35	20,6486	,18424
BHPR	36	17,39	18,55	642,05	17,8346	,24995
LW	36	3,45	11,34	206,49	5,7358	2,40866
JPD	36	8,00	29,00	663,00	18,4167	6,72044
JP	36	3,19	10,81	239,40	6,6500	2,47679
BM	36	19,67	21,65	745,55	20,7096	,50491
Valid N (listwise)	36					

Olah data dengan menggunakan (SPSS 23)

### Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk memastikan apakah persamaan regresi dan variabel independen berkorelasi. Uji multikolinieritas antara lain sebagai berikut:

**Tabel 2. Pengujian Multikolinieritas**

Model		Coefficients <sup>a</sup>	
		Tolerance	Collinearity Statistics VIF
1	(Constant)		
	PADes	,906	1,103
	DD	,173	5,771
	ADD	,235	4,264
	BHPR	,767	1,303
	LW	,349	2,863
	JPD	,678	1,475
	JP	,177	1,036

a. Dependent Variable: BM

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat.

**Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.448 <sup>a</sup>	,845	,557	,504645498534733	1,981

a. Predictors: (Constant), PAdes, DD, ADD, BHPR, LW, JPD, JP

b. Dependent Variable: BM

### Uji Signifikansi (Uji F)

Uji ini bertujuan agar melihat ada atau tidaknya seluruh variabel bebas disaat melakukan uji mempunyai hubungan secara bersamaan terhadap variabel terikat.

**Tabel 4. Uji Signifikasi (Uji F)**

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1,792	7	,256	2,842	.049 <sup>b</sup>
Residual	7,131	28	,255		
Total	8,923	35			

**Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji T)**

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan pengaruh antar variabel bebas dengan variabel terikat secara signifikan.

**Tabel 5. Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji T)**

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1,749	32,885		-,053	,958		
PADes	-,011	,013	-,157	-,886	,383	,906	1,103
DD	1,399	1,082	,525	1,934	,044	,173	5,771
ADD	-,781	,956	-,285	-,817	,421	,235	4,264
BHPR	,505	,390	,250	1,958	,046	,767	1,303
LW	,042	,060	,201	,702	,489	,349	2,863
JPD	,009	,015	,116	,567	,575	,678	1,475
JP	-,065	,124	-,318	-,522	,606	,177	1,036

a. Dependent Variable: BM

**Pengaruh PADes terhadap Belanja Modal**

PADes memiliki nilai signifikan 0,383, nilai ini lebih banyak dari pada 0,05, artinya hipotesis ini tidak diterima. Penyebab ketidaksignifikanan ini dikarenakan total dari PADes ini masih sangat rendah dibandingkan dengan total pendapatan desa. Penelitian ini sesuai sama penelitian Wulandari dkk., (2021) yang menyebutkan PADes tidak mempengaruhi Belanja Modal Desa. tetapi, penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Murtadlo dkk., (2022) yang menyebutkan PADes mempengaruhi Belanja Desa. Pada penelitian Wulandari dkk., (2021), alasan ketidak signifikanan ini dikarenakan partisipasi dari pendapatan pemerintah desa terhadap jumlah perolehan yang sangat kecil. Namun, pada penelitian Murtadlo dkk., (2022), alasan kesignifikanan ini dikarenakan dalam hal pentingnya sumber daya keuangan untuk mendanai program dan operasional pemerintah desa secara keseluruhan, PADes sejauh ini merupakan faktor yang paling penting atau yang paling sering digunakan oleh pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan anggaran untuk mendanai program yang telah mendapat persetujuan.

**Pengaruh Dana Desa terhadap Belanja Modal**

Dana Desa memiliki nilai signifikan 0,044, nilai ini lebih kecil dari pada 0,05, artinya hipotesis ini di tolak. DD mempengaruhi belanja modal secara positif signifikan karena apabila



memperhatikan tabulasi data, untuk variabel dana desa rata-rata nilainya tinggi. Artinya desa mendapatkan Dana Desa lebih yaitu diatas 1,5 miliar, begitu juga dengan belanja modal rata-rata nilainya juga tinggi setiap tahunnya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wulandari dkk., (2021) menyebutkan bahwa Dana Desa mempengaruhi belanja modal desa. Akan tetapi, penelitian ini terbalik dengan penelitian Purbasari dkk., (2018) yang menyebutkan Dana Desa tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal Desa. Pada penelitian Wulandari dkk., (2021) alasan kesignifikanan ini dikarenakan besar kecilnya nilai dana desa akan mempengaruhi belanja moodal, misalnya dalam biaya membangun jalan, jembatan, irigasi, dan jaringan. Namun, pada penelitian Purbasari dkk., (2018), alasan ketidaksignifikanan ini dikarenakan berdasarkan PMK Nomor 49 Tahun 2016 dimana rumus ADD ditiap desa sebanyak 90%, sehingga Dana desa dimasing-masing desa mempunyai total yang hampir sama, sehingga variabel DD tidak sesuai sama varian Belanja Modal dimasing-masing Desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 101 Tahun 2021 yakni dana desa dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa wajib memanfaatkan dan mengelola dana tersebut dengan sebaik-baiknya guna membiayai pengeluaran desa, khususnya belanja modal.

#### **Pengaruh ADD terhadap Belanja Modal**

Alokasi Dana Desa memiliki nilai signifikan 0,421, nilai ini lebih besar dari pada 0,05, artinya hipotesis ini di tolak. Variabel ini tidak mempengaruhi belanja modal karena apabila dilihat dari tabulasi data rata-rata nilainya tinggi, begitu juga dengan belanja modal rata-ratanya juga tinggi setiap tahunnya. Secara teori apabila ADD tinggi dan Belanja modalnya juga tinggi seharusnya berpengaruh, akan tetapi statistik infrensialnya menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Saputri dkk, 2023) menyebutkan bahwa ADD tidak mempengaruhi belanja desa, sedangkan penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Yuliawati (2019) yang menyatakan bahwa ADD dapat berpengaruh terhadap belanja modal desa di bidang pembangunan desa. Pada penelitian Yuliawati (2019) alasan kesignifikanan ini karena dalam bidang pembangunan desa, ADD yang besar akan memungkinkan suatu daerah dapat memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa terlalu bergantung pada pemerintah kabupaten, sehingga semakin tinggi ADD maka pertumbuhan belanja desa akan semakin besar. Namun, pada peneliti (Saputri dkk., 2023), alasan ketidaksignifikanan ini dikarenakan ADD terlebih dahulu digunakan untuk anggaran belanja pegawai dan sisanya untuk membiayai pemberdayaan masyarakat desa, maka besarnya ADD belum tentu berkontribusi terhadap belanja desa.

#### **Pengaruh BHPR terhadap Belanja Modal**

BHPR memiliki nilai signifikan 0,046, nilai ini lebih kecil dari pada 0,05, artinya hipotesis ini diterima. Variabel ini mempengaruhi belanja modal karena apabila dilihat dari tabulasi data, untuk variabel BHPR rata-rata nilainya tinggi, begitu juga dengan belanja modal rata-rata nilainya juga tinggi setiap tahunnya. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Saputra dkk., (2021), dan Kiha dkk., (2021). Penelitian Saputra dkk., (2021) menyebutkan bahwa BHPR mempengaruhi belanja desa di bidang pendidikan adapun penelitian Kiha dkk., (2021) menyebutkan bahwa BHPR meempengaruhi alokasi belanja modal di Provinsi NTT. Namu, penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Saputri dkk., (2023) yang menyebutkan bahwa BHPR tidak mempengaruhi belanja desa. Pada penelitian Saputri dkk., (2023) alasan ketidaksignifikanan ini dikarenakan besar kecinya BHPR belum tentu memberikan konstribusi terhadap belanja desa. Sedangkan pada penelitian Saputra dkk., (2021) alasan kesignifikanan ini dikarenakan BHPR didasarkan pada bagi hasil yang merupakan bagian dari sumber

pendapatan desa yaitu pembagian pajak lokal Kabupaten/Kota dan upah lokal contohnya distribusi pendapatan dari pajak properti. Dana Bagi Hasil memungkinkan pemerintah menggunakan belanja modal untuk menyelesaikan struktur dan infrastruktur publik (Kiha dkk, 2021). Sesuai dengan Perbup Lombok Tengah No. 39 Tahun 2019 tentang Penduan Penyusunan APBDes Tahun 2020, dana BHPR kabupaten dan kota dapat digunakan untuk mendukung kegiatan yang sedang berjalan di bidang mitigasi bencana, kesiapsiagaan darurat, dan pengembangan masyarakat serta kegiatan aktif yang berkaitan dengan pemerintahan desa, pengembangan pemerintahan desa, dan pengembangan masyarakat.

### **Pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal**

Luas wilayah memiliki nilai signifikan 0,489, nilai ini lebih besar dari pada 0,05, artinya hipotesis ini ditolak. Jumlah penduduk Kecamatan Janapria yakni 87.073 jiwa dengan luas wilayah 69,05 km<sup>2</sup> pada tahun 2021, sedangkan pada tahun yang sama Kecamatan Pujut mempunyai jumlah penduduk 1.059.324 jiwa dengan luas wilayah 233,55 km<sup>2</sup>, angka ini lebih kecil dibandingkan dengan Kecamatan Janapria. Luas wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja modal desa karena desa yang luas dan jumlah penduduknya sedikit tidak mampu menopang belanja modal di desa tersebut. Jumlah penduduk dan luas wilayah suatu desa kemungkinan besar akan berdampak pada belanja modal masyarakat (Zulaihah 2019). Penelitian Zulaihah (2019) menyebutkan bahwa luas wilayah tidak berpengaruh atas belanja modal daerah. Akan tetapi, penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dkk (2021) yang menyebutkan bahwa luas wilayah tidak mempengaruhi belanja modal desa. Jika suatu desa mempunyai jumlah penduduk yang sedikit, maka pemerintah ragu untuk melaksanakan pembangunan desa karena jumlah penduduknya tidak banyak. Namun jika suatu desa mempunyai jumlah penduduk yang besar maka besar kemungkinan pemerintah akan melaksanakan pembangunan desa. Kenyataannya, prasarana dan sarana suatu desa akan memanfaatkan pembangunan secara luas jika jumlah penduduknya banyak.

### **Pengaruh Jumlah Perangkat Desa terhadap Belanja Modal**

Jumlah perangkat desa memiliki nilai signifikan 0,575, nilai ini lebih besar dari pada 0,05, artinya hipotesis ini ditolak. Banyaknya perangkat desa di suatu desa membutuhkan sarana dan prasarana seperti komputer, kendaraan untuk staf desa, dan bangunan guna mendukung pelayanan pemerintah desa. Namun, untuk pada saat ini sarana dan prasarana tersebut masih layak dipergunakan sehingga pemerintah desa tidak mengalokasikan anggaran yang begitu banyak untuk hal tersebut. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Wulandari dkk; (2021) yang menyebutkan bahwa jumlah perangkat desa tidak berpengaruh terhadap belanja modal desa. Namun, penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Wahyudi & Hasri (2021) yang menyatakan bahwa kualitas perangkat desa mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa secara positif.

### **Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal**

Jumlah penduduk mempunyai nilai signifikan 0,606, nilai ini lebih banyak dari pada 0,05, artinya hipotesis ini ditolak. Belanja modal tidak dipengaruhi oleh jumlah penduduk, karena kemungkinan besar infrastruktur yang dibangun di desa-desa di Kecamatan Janapria selama tiga tahun terakhir ini masih memadai sehingga pemerintah desa dapat menambah atau memeliharanya tanpa menggunakan sumber daya yang ada secara berlebihan. Rata-rata kepadatan penduduk desa di Kecamatan Janapria adalah 822 jiwa/Km<sup>2</sup>, lebih rendah daripada rata-rata kepadatan penduduk di Kecamatan Kopang sebesar 1.542 jiwa/Km<sup>2</sup> (BPS Kabupaten Lombok tahun 2021). Jadi dapat disimpulkan bahwa dari tingkat kepadatan penduduk

Kecamatan Kopang jauh lebih padat penduduknya dibandingkan Kecamatan Janapria. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Marseno & Mulyani; (2020) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak mempengaruhi belanja modal di Sumatra Barat, sedangkan penelitian Kiha dkk, (2021) yang menyatakan bahwa Jumlah Penduduk mempengaruhi anggaran belanja modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan penelitian saat ini, maka dapat dikatakan bahwa DD dan BHPR mempunyai pengaruh secara parsial terhadap belanja modal. Namun seluruh variabel independen berpotensi mempengaruhi belanja modal Desa secara kolektif.

Saran bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mendalami apa saja yang menjadi penentu terhadap belanja modal di desa, diharapkan menambahkan Laporan Realisasi APBDes dan variabel penelitian guna mengetahui hasil penelitian yang lebih baik lagi. Hal ini dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang berguna untuk mendukung upaya ilmiah dan sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

## **REFERENSI**

- Adani, L. D. P., Fikri, M. A., and Nurabiah. (2023). Analysis of earnings management practices in PROPER companies. *New Applied Studies in Management*, 6(4), 34–43.
- Adiwiyana, P. (2011). *PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL*.
- Amnan, A. R., and Hardiani, H. S. (2019). *Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa*. 1(1), 37–55. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31227/osf.io/frkez>
- Anton, F. X. (n.d.). *Menuju Teori Stewardship Manajemen*.
- Dasuki, T. M. S. (2020). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA DAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP BELANJA DESA DI KAB. MAJALENGKA. 1*.
- Febriani, B. S. F., Fikri, M. A., and Nurabiah, N. (2023). Analysis of Income Smoothing Practices in PROPER Companies. *International Journal of Academe and Industry Research*, 4(3), 1–19. <https://doi.org/10.53378/352999>
- Halima. (2016). *ANALISIS PENGARUH BELANJA MODAL DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA PEMELIHARAAN DALAM REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Padang)*.
- Handajani, L. (2019). Corporate Governance dan Green Banking Disclosure: Studi pada Bank di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 121–136. <https://doi.org/10.24815/jdab.v6i2.12243>
- Handajani, L., Rifai, A., and Husnan, L. H. (2019). Kajian Tentang Inisiasi Praktik Green Banking Pada Bank BUMN (Handajani Kajian Tentang Inisiasi Praktik Green Banking Pada Bank BUMN. *Jurnal Economica*, 15(1), 1–16. <https://journal.uny.ac.id/index.php/economia>
- Ilmiah, J., and Pendidikan, W. (2023). 1, 2 1,2. 9(April), 204–212.
- Indika, M., Marliza, Y., and Marisa, A. (2022). *Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara*. 2(1).
- Irfan Saputra, Nurhidayah, E. S. (n.d.). Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADES), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Serta Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan (Studi. 2021, 32, 23–36.

- Iskandar, N., Pusparini, H., and ... (2022). Prediksi Financial Distress pada Perusahaan Sektor Pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah Periode 2019-2020. *Jurnal Online ...*, 7(2), 131–140. <http://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JOIA/article/view/1875%0Ahttps://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JOIA/article/download/1875/1482>
- Jefri, R. (2018). *Teori stewardship dan good governance*. 4(003), 14–28.
- KIHA, E. K., OKI, K. K., and SERAN, A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Dan Jumlah Penduduk Terhadap Anggaran Belanja Modal Di Provinsi Nusa .... *Jurnal Ekonomi, Sosial & ...*, 2(08).
- Makhfudloh, F., Herawati, N., and Wulandari, A. (2018). Jurnal Akuntansi dan Bisnis Kontemporer. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 18(1), 48–60.
- Marseno, B., and Mulyani, E. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Penduduk Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016-2019). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3452–3467.
- Murtadlo, A., Pravasanti, Y. A., and Pratiwi, D. N. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Desa Di Kecamatan Kalijambe. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 1(2), 98–109. <https://doi.org/10.53088/jikab.v1i2.18>
- Nugroho, S. A. M. M. (2020). *Pengaruh Pemahaman Akuntansi Koperasi Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik, Tingkat Kompetensi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia*. 12(1).
- Nur Fitriyah, Herlina Pusparini, and Nurabiah, N. (2021). Akuntabilitas Keuangan Lembaga Filantropi Islam Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 20(1), 33–45. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v20i1.123>
- Nurabiah, N. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 3(1), 067–100. <https://doi.org/10.29303/jaa.v3i1.36>
- Nurabiah Pusparini, H., Fitriyah, N., and Mariadi, Y. (2019). Implementasi PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq, dan sedekah (studi pada badan amil zakat, infaq, sedekah di Kota Mataram). *Aksioma: Jurnal Riset Akuntansi*, 18(1), 22–56.
- PINILIH, H. W. (2018). *ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA, DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI TERHADAP BELANJA DESA BIDANG INFRASTRUKTUR (Studi pada Desa – Desa di Kabupaten Wonogiri)*.
- Pratama, I. G. A. A., and Wiratmaja, I. D. N. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(10), 2556. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i10.p12>
- Pudza, I. W. (2023). *Comparative Research Implementation of CSR ( Corporate Social Responsibility ) in Various Sectors of the Indonesian Stock Exchange*. 9(4), 489–499.
- Purbasari, H., Puspawati, D., Lestari, S., Pratiwi, K., Akuntansi, P. S., Surakarta, U. M., and Pos, T. (2018). *ANALISIS PENDAPATAN ASLI DESA (PADES), DANA DESA (DD), ALOKASI DANA DESA (ADD), DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI (BHPR) TERHADAP BELANJA MODAL DESA DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2017*. 6, 487–492.
- Pusparini, H., Nurabiah, N., and Mariadi, Y. (2022). Analisis Content Iklan Bidang Akuntansi Dengan Persyaratan Keterampilan Akuntan. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(1), 81–94. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i1.163>
- Raharjo, E. (2016). *TEORI AGENSI DAN TEORI STEWARSHIP DALAM PERSPEKTIF*

- AKUNTANSI. *The Management of Intellectual Property*, 40–65. <https://doi.org/10.4337/9781847201553.00009>
- RAMADHAN, T. B. A. (2019). ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADES), DANA DESA (DD), ALOKASI DANA DESA (ADD), DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI (BHPR) TERHADAP ALOKASI BELANJA DESA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Empiris: Desa-Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2017). Dd.
- Rogers, M., and Taufiqurrahman, M. (2021). *The Development of Village Authority in the History of the State of the Republic of Indonesia ( Study on Village Level Autonomy )*. 04(06), 753–764. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v4-i6-12>
- Rohmah, N., and Riharjo, I. B. (2019). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN LUAS WILAYAH TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Pada Kabupaten/Kota Se Privinsi Jawa Timur Tahun 2013 – 2017). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(6), 1–17.
- Saputra, R., and Ningsih, S. (2022). *Pengaruh akuntabilitas , transparansi dan peran perangkat desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) Kecamatan Juwiring*. 2(2), 86–98.
- Saputri, S. N., Rahayu, S., Terhadap, D., Desa, B., Kasus, S., Desa, P., and Tahun, B. (2023). *Pengaruh Dana Desa , Alokasi Dana Desa , Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Bawang Tahun 2018-2020*. 11(1), 53–62.
- Sari, E. P., Handajani, L., and AM, S. (2016). Corporate Governance dan Relevansi Nilai Dari Penghindaran Pajak: Bukti Empiris Dari Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 33–48. <https://doi.org/10.24815/jdab.v3i2.5385>
- Sitiana Muslikah, Sulistyono, R. I. M. (2020). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA ( PAD ), DANA DESA ( DD ), ALOKASI DANA DESA ( ADD ) TERHADAP BELANJA DESA BIDANG PENDIDIKAN DENGAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN SEBAGAI VARIABEL MODERASI. 8(1), 1–10.
- Wahyudi, A., and Hasri, D. A. (2021). Pengaruh Kualitas Perangkat Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 293–298. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.795>
- Wulandari, D. Y., Dwi, A., and Bawono, B. (2021a). *Analisis Determinan Atas Belanja Modal Desa ( Studi Empiris pada Desa-Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 )*. 8(1), 84–88.
- Wulandari, D. Y., Dwi, A., and Bawono, B. (2021b). *Analisis Determinan Atas Belanja Modal Desa ( Studi Empiris pada Desa-Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 ) Abstract . This research aims to determine the determinants of village capital expenditure ( Empirical Study on Villages in Sukoharjo Regency in*. 8(1), 84–88.
- YULIAWATI, N. N. (2019). PENGARUH ALOKASI DANA DESA (ADD), DANA DESA (DD), PENDAPATAN ASLI DESA (PADes), DAN BANTUAN KEUANGAN APBD TERHADAP BELANJA DESA BIDANG PEMBANGUNAN DESA. Dd.
- Zulaihah, S. (2019). PENGARUH PENDAPATAN DAERAH DAN LUAS WILAYAH TERHADAP BELANJA MODAL. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(22).